

TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI DEMOKRATISASI EKONOMI

ISNAENI ACHDIAT





ISNAENI ACHDIAT

Project⁺, CIA, CISA, CISM, CGEIT

- Ernst & Young, Managing Director, Asia Pacific Advisory Council Member
- ISACA Indonesia Chapter, President 2015 – 2019
- Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI), National Council Member 2019 – 2024
- Media AKUTAHU, Social Venture to Bring Up Positive Journalism in Indonesia, Founder
- University of Indonesia, Faculty of Economics and Business, Senior Lecturer
- Candidate PhD for Information System, with Research in Audit Innovation

DUA FOKUS UTAMA TRANSFORMASI MELALUI DEMOKRATISASI EKONOMI

Pembangunan Manusia

Perkembangan digital/teknologi mendorong **pergeseran kebutuhan *skill*** di masa depan

10 Jenis Keterampilan (*Skill*) yang Akan Semakin Dibutuhkan di Tahun 2022

1. Daya pikir analitis dan inovatif
2. Pembelajar yang aktif dan strategis
3. Kreativitas, originalitas, dan inisiatif
4. Kemampuan *programming* dan teknologi desain
5. Kemampuan analitis dan daya pikir kritis
6. Kemampuan memecahkan masalah yang kompleks
7. Kepemimpinan dan kemampuan memberikan pengaruh kepada lingkungan sosial
8. Kecerdasan emosional
9. Logika penyelesaian masalah, *reasoning*, dan penuh ide
10. Kemampuan analisis sistem dan evaluatif

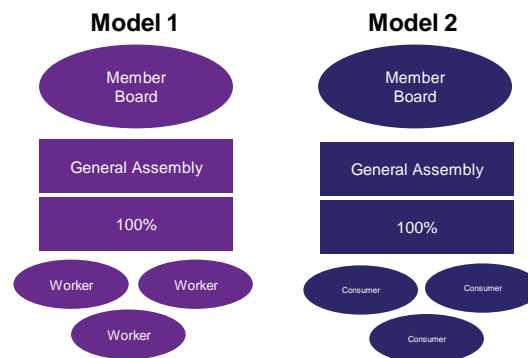
Sumber: World Economic Forum (WEF), 2018

Ekonomi Inovatif

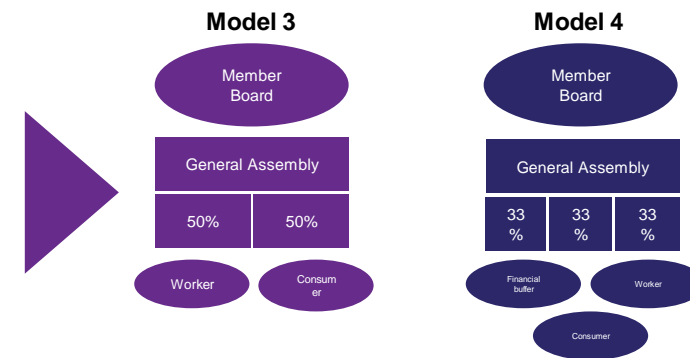
Inovasi dapat dilakukan misalnya pada Koperasi agar adaptif untuk dapat bersaing dalam ekonomi saat ini. Begitu pula dengan UMKM.

Usulan Perubahan Model Koperasi*

Gambar 1



Gambar 2



Model koperasi yang lebih heterogen dapat lebih menjangkau komunitas yang lebih luas

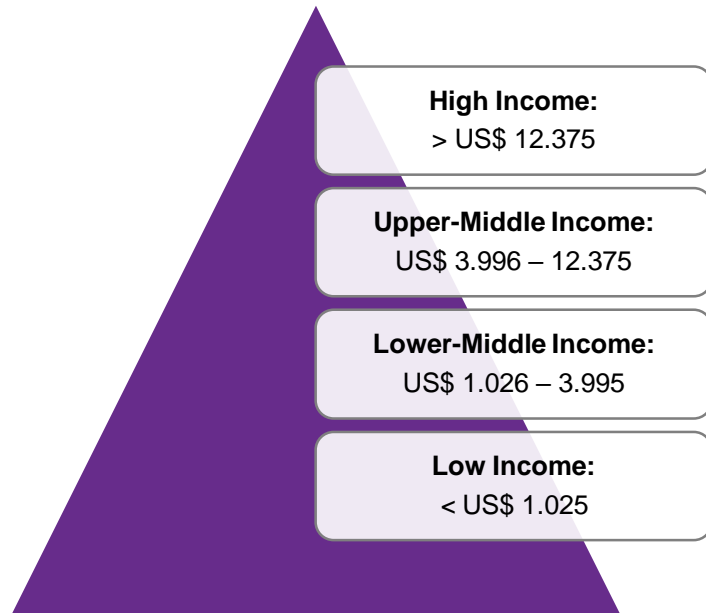
*Sumber: <https://indoprogess.com/2014/07/jokowi-demokrasi-ekonomi-dan-koperasi/>

INDONESIA SAAT INI: DALAM MIDDLE INCOME TRAP (MIT)

DEFINISI

Kondisi dimana suatu negara tidak dapat bergeser dari tingkat pendapatan menengah (*middle income class*) menjadi berpendapatan tinggi (*high income class*)

KLASIFIKASI PENDAPATAN NEGARA (BERDASARKAN GNI per Capita WORLD BANK, 2019)



Dengan demikian, jika masih berada dalam *middle income trap*, sebuah negara tidak dapat berubah menjadi negara maju

<http://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-income-level-2019-2020>

Menurut data World Bank 2018, **pendapatan per kapita Indonesia** masih dalam angka **US\$ 3.840**, sehingga masih dalam kategori *lower middle income country*

Beberapa negara yang masih dalam *middle income trap* (dan proyeksi waktu yang dibutuhkan)

	MIDDLE-INCOME (MI) STATUS (2013)	TRANSITION TO LOWER MI	TRANSITION TO UPPER MI	APPROXIMATE YEARS AS MI
China, People's Republic	UPPER	1998	2010	15
Indonesia	LOWER	PRE-1987	-	26
Malaysia	UPPER	PRE-1987	1992	26
Mexico	UPPER	PRE-1987	1990	26
Papua New Guinea	LOWER	PRE-1987	-	26
Peru	UPPER	PRE-1987	2008	26
Philippines	LOWER	PRE-1987	-	26
Thailand	UPPER	PRE-1987	2010	26
Vietnam	LOWER	2008	-	5

Contoh negara yang berhasil keluar dari Middle Income Trap (dan lama waktu yang dibutuhkan)

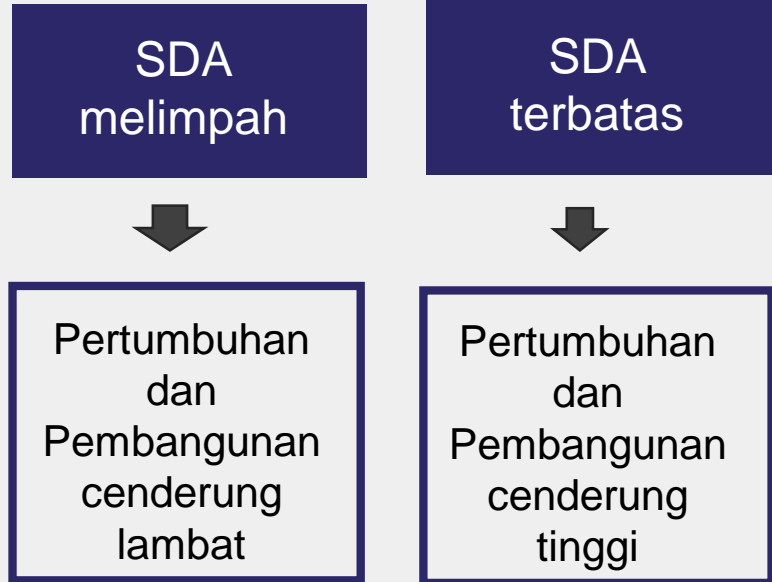


Source: *Felipe, Jesus, et al. *Tracking the Middle-Income Trap: What is it, Who is in it, and Why? Part 1*, 2012.

<http://www.neda.gov.ph/%e2%80%8bneda-hosts-apec-seminar-middle-income-trap/>

KONDISI EKONOMI SAAT INI

Kutukan Sumber Daya Alam



Pertumbuhan Ekonomi Konstan

- Pemerataan kurang diperhatikan
- Pertumbuhan dominan pada konsumsi

Politik & Ekonomi Tidak Sinkron

- Kebijakan yang diambil kurang implementatif
- Kebocoran anggaran (salah satunya karena korupsi) masih terjadi
 - Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 masih berada di peringkat 89 dengan skor 38

Solusi Dasar

Tingkatkan Akuntabilitas Publik

- Akuntabilitas Etika
- Akuntabilitas Kebijakan
- Akuntabilitas Kinerja

Tingkatkan Inklusi Ekonomi

- Inklusi Keuangan
- Inklusi Kesempatan Usaha

EKONOMI KERAKYATAN = EKONOMI PANCASILA

- Demokratisasi ekonomi adalah cara untuk memberikan rakyat peluang untuk menghasilkan kekayaan dan pendapatan secara adil
- Demokratisasi ekonomi dalam aspek hukum diatur dalam:
 - Pasal 33 UUD 1945 (Demokrasi Ekonomi)
 - Ketetapan TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Ekonomi Politik dalam rangka Demokratisasi Ekonomi

Beberapa Agenda dalam Demokratisasi Ekonomi

- Lakukan reformasi regulasi dengan merevisi seluruh UU menyangkut masalah perekonomian dan kemasyarakatan
- Lakukan agenda reforma agraria secara progresif
- Ciptakan kendali bisnis di tangan banyak orang dan koperasi

Peran Negara

- Mendorong terciptanya lapangan kerja baru, terutama melalui pengembangan usaha-usaha terutama UMKM, sehingga kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional dapat lebih besar
- Menjamin terciptanya birokrasi dan iklim usaha yang kondusif dan menjangkau lapisan bawah

EKONOMI DIGITAL DAN PERKEMBANGANNYA

Mengoptimalkan ekonomi digital dapat memberikan kesempatan usaha yang lebih besar bagi masyarakat luas dan dapat mewujudkan *share prosperity*

- Pertanyaan penting yang harus dijawab: ***Bagaimana membuat fasilitas teknologi yang bisa memberdayakan masyarakat lapisan bawah untuk mendapatkan akses pasar dari masyarakat lapisan ekonomi yang lebih mampu?***

Beberapa Karakteristik Ekonomi Digital

- *Knowledge*
- *Digitation*
- *Internet working*
- *Innovation*
- *Globalization*

Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Ekonomi Digital

- Pemerataan akses listrik yang mendukung infrastruktur langit sehingga akses internet lebih cepat dan lancar
- Pemerataan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan *entrepreneurship* & inovasi
- Pemberdayaan UMKM melalui akses finansial, misalnya pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) : EVALUASI 2018

ALOKASI

- Alokasi 2018 = Rp. 117 Triliun
- Alokasi 2019 = Rp. 140 Triliun
- Perluasan bidang pemanfaatan KUR = Sektor pariwisata (agen travel, MICE, penyedia makanan & minuman, jasa konsultan wisata, dll)

REALISASI

- Masih banyak yang masuk dalam sektor non-produktif
- Per November 2018, realisasi KUR produktif : < 50%
- Faktor penyebab realisasi KUR produktif rendah:
 - Faktor kehati-hatian perbankan
 - Potensi kredit macet di sektor produktif relatif besar

TINDAK LANJUT

- Pengelompokan usaha produksi
- Penyusunan sistem monitoring dan risk assesment

KOPERASI DAN PERKEMBANGANNYA

- Adanya gugatan terhadap UU No. 17 Tahun 2012 yang dinilai melanggar demokratisasi ekonomi seperti tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945

Konsep Koperasi dalam Demokrasi Ekonomi



- S merupakan kerja-kerja untuk lakukan perluasan skala koperasi, dimana Perluasan skala (S) harus mengacu pada konsepsi dasar koperasi sebagai perusahaan berbasis orang (*people based enterprise*) sehingga memberikan pemerataan ekonomi
- K merupakan penguatan kontrol atau kendali anggota dalam organisasi koperasi, dimana Penguatan kontrol (K) ini merupakan fitur dasar yang menempatkan supremasi orang di atas modal.
- V adalah kerja-kerja untuk meningkatkan pertumbuhan atau volume usaha koperasi. Dengan peningkatan volume usaha (V), banyaknya anggota menjadi basis pertumbuhan yang berkeadilan. Sebabnya, setiap anggota dituntut untuk melakukan partisipasi ekonomi dalam bentuk modal sekaligus transaksi

Sumber:

- <https://www.bantuanhukum.or.id/web/koalisi-lsm-gugat-uu-koperasi-ke-mk/>
- <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/208>

KOPERASI, UMKM & USAHA BESAR DALAM ANGKA

KOPERASI (2018)

- Anggota Koperasi di Indonesia telah mencapai lebih dari 20 juta orang, dengan volume usaha sebesar Rp. 146 Triliun
- Contoh Koperasi sukses di Indonesia adalah Koperasi Telekomunikasi Selular (Kisel) yang masuk dalam jajaran 100 Koperasi Besar Dunia menurut *World Cooperative Monitor (WCM)*

• Koperasi Aktif	: 126.343 unit
• Anggota Koperasi	: 20.049.995
• Modal Sendiri	: ~ Rp. 75 Triliun
• Modal Luar	: ~ Rp. 66 Triliun
• Volume Usaha	: ~ Rp. 146 Triliun
• SHU	: ~Rp. 6 Triliun

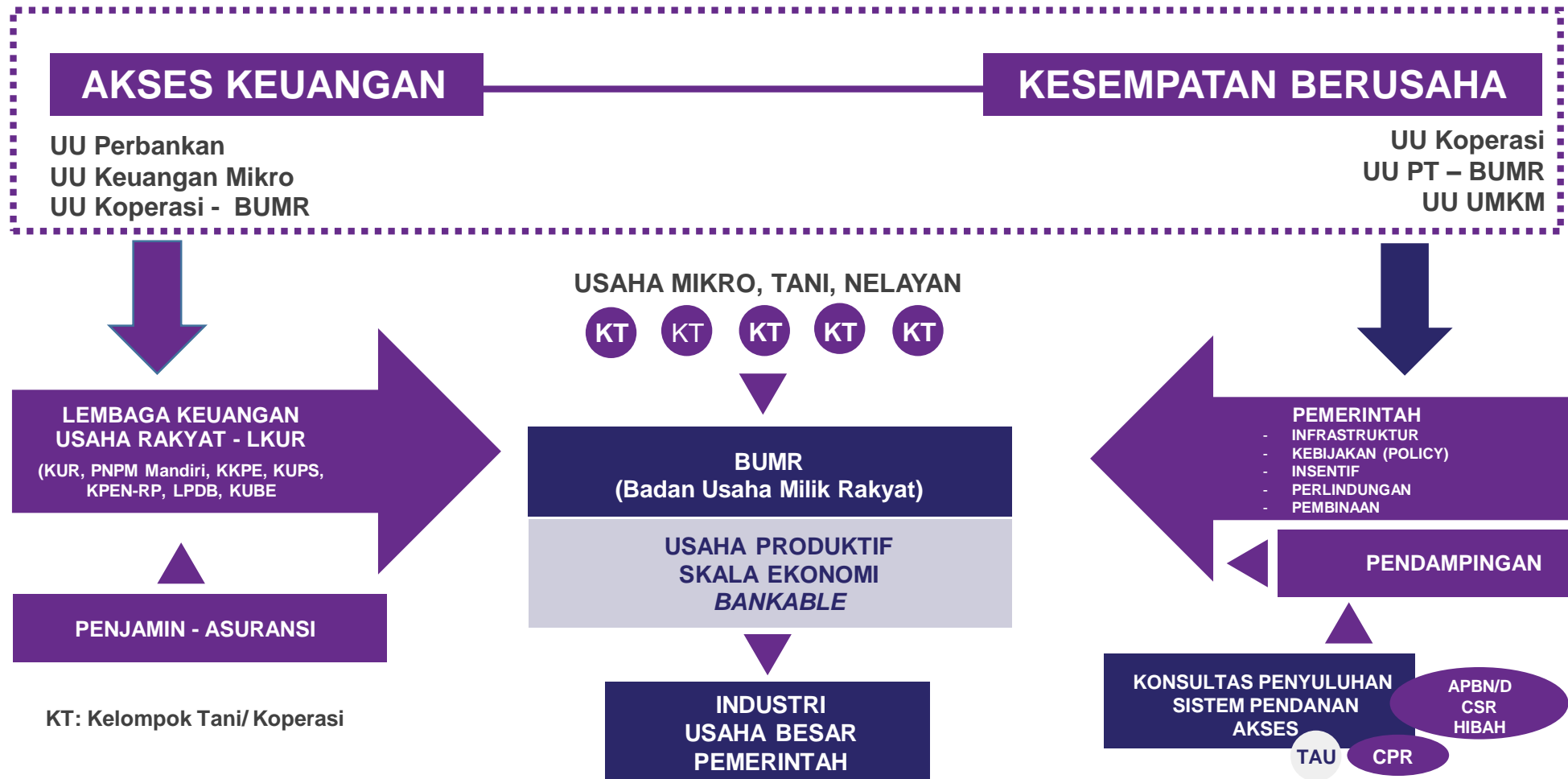
- Dalam UMKM & Usaha Besar, berdasarkan PDB, Usaha Besar masih memberikan kontribusi tertinggi dibandingkan Usaha Mikro, Usaha Kecil maupun Usaha Menengah

UMKM & USAHA BESAR (2017)

Indikator	Satuan		Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar
Unit Usaha	Unit	Jumlah (Pangsa %)	62.106.900 (98,70%)	757.090 (1,20%)	58.627 (0,09%)	5.460 (0,01%)
Tenaga Kerja	Orang	Jumlah (Pangsa %)	107.232.992 (89,17%)	5.704.321 (4,74%)	3.736.103 (3,11%)	3.586.769 (2,98%)
PDB atas dasar harga berlaku	(Rp. Miliar)	Jumlah (Pangsa %)	4.727.989,4 (36,82%)	1.234.210,7 (9,61%)	1.742.435,7 (13,57%)	5.136.223,1 (40 %)

BUMR : KONSEP LEMBAGA PELAKU EKONOMI & KEUANGAN INKLUSIF

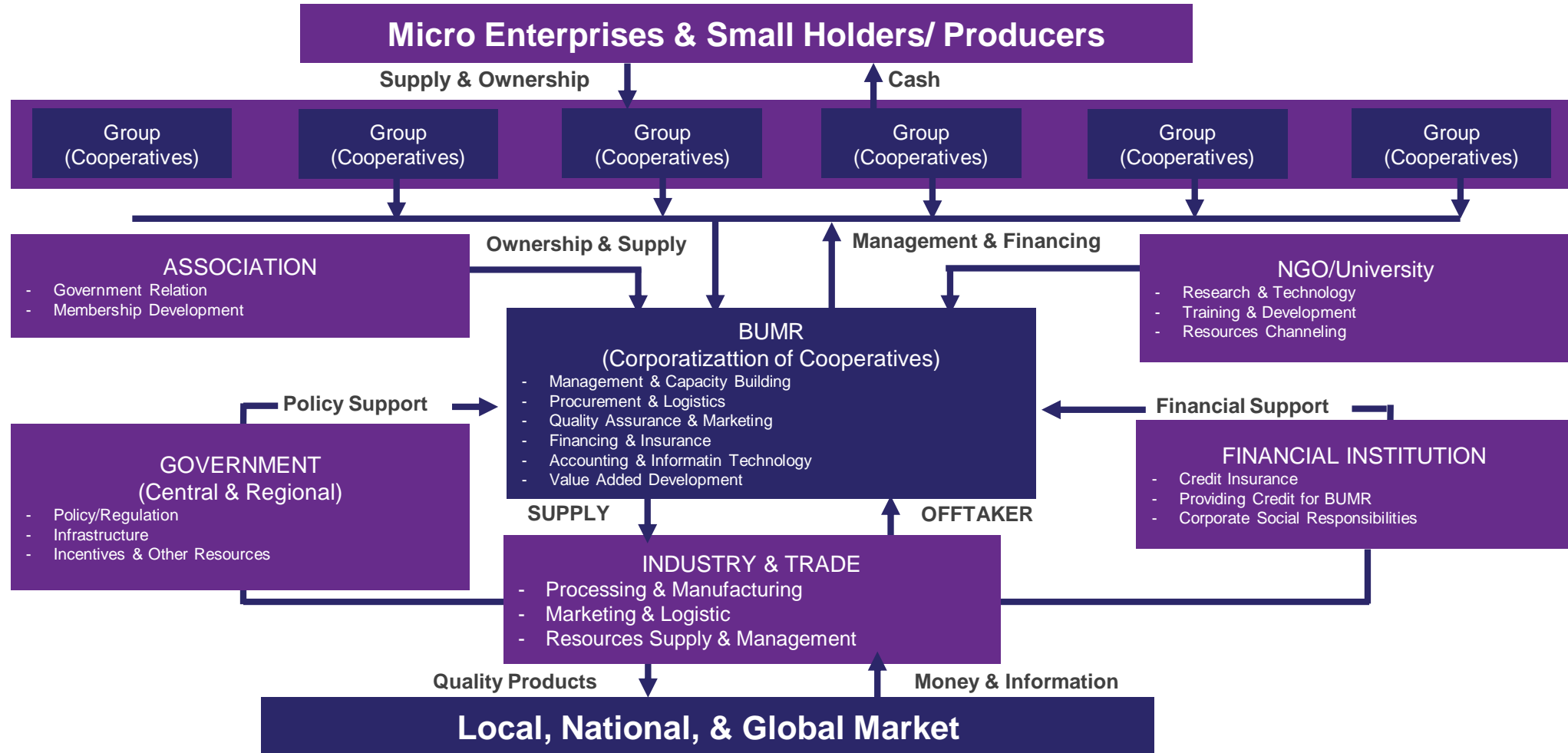
BUMR atau Badan Usaha Milik Rakyat merupakan salah satu konsep lembaga selain BUMN dan BUMS yang juga bertujuan untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan di Indonesia



KONSEP BUMR DAN EKOSISTEMNYA

Konsep usaha BUMR yang dikembangkan Tanri Abeng, merangkul berbagai entitas dan komunitas, sehingga ekosistem ekonomi dan keuangan inklusif dapat terbangun

BUMR: THE "TA"MODEL



DINAMIKA DEMOKRATISASI EKONOMI

Kontribusi besar Presiden Habibie

- Mencabut banyak regulasi yang menghambat proses demokrasi, salah satunya dengan menerbitkan UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat
- Mendorong berbagai cara menuju kebebasan pers, termasuk mencabut syarat Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)
- Memulihkan tingkat kepercayaan investor paska krisis moneter Indonesia 1998 dengan cara memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah (independen), menjaga stabilitas harga dan ekonomi makro

DEMOKRATISASI EKONOMI DALAM MENGHADAPI ERA EKONOMI DIGITAL & INDUSTRI 4.0

"Saat ini, kita telah memasuki era revolusi industri 4.0 atau ekonomi digital, yang menjadi *'tools'* dalam mewujudkan demokratisasi ekonomi. Artinya, peluang terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menjadi wirausaha yang mandiri dan tangguh sehingga ekonomi ini tidak hanya dimiliki oleh sebagian kelompok atau elite tertentu saja,"

"Dalam implementasi ekonomi digital itu yang penting di antaranya adalah membangun ekosistem. Jadi, pondok pesantren perlu kita bidik karena memiliki basis dan potensi besar untuk menggerakkan perekonomian nasional,"

Airlangga Hartanto, saat masih menjabat sebagai Menteri Perindustrian (2018)

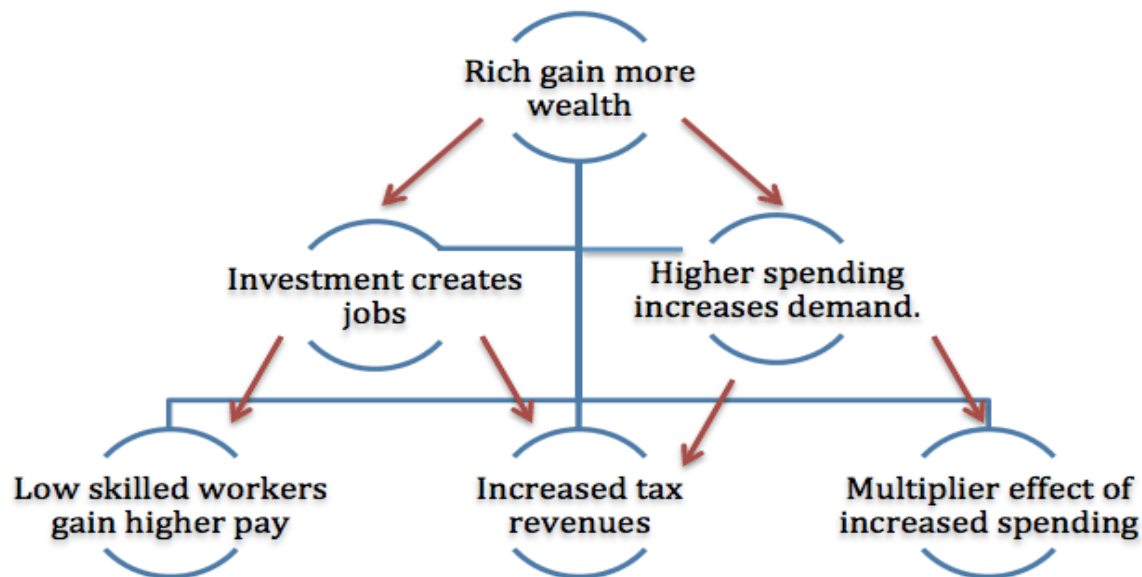
Sumber:

- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3534375/ketemu-santri-menperin-ajak-pesantren-kembangkan-industri-digital>

TRICKLE DOWN vs BOTTOM UP ECONOMICS

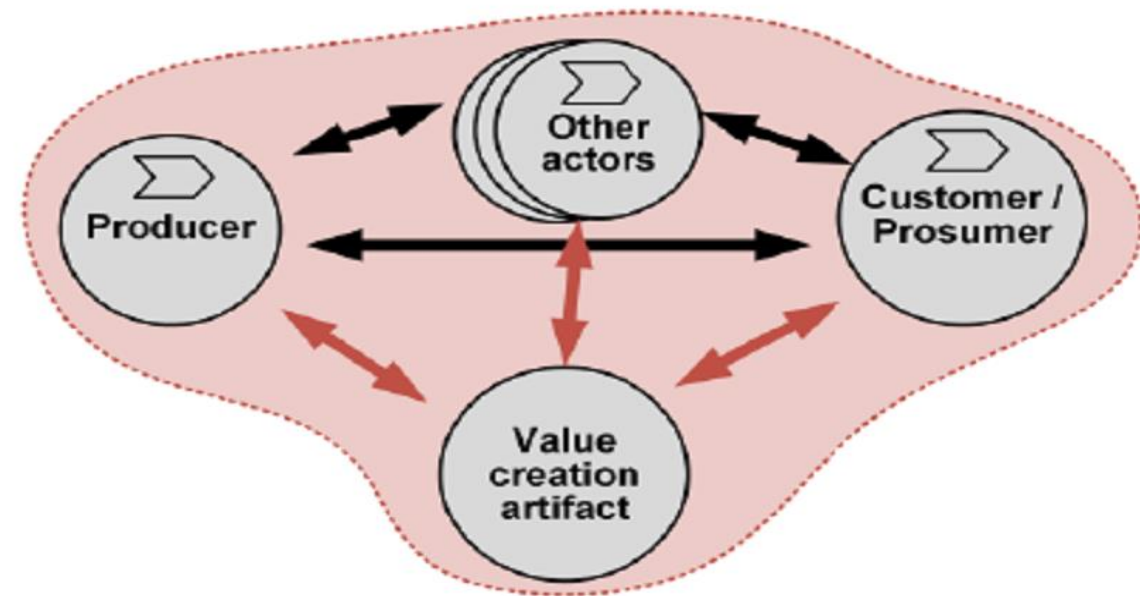
- Dalam beberapa studi di negara lain, kebijakan *trickle down economics* justru dapat memperlebar disparitas atau kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat
- Dalam konteks Indonesia, kebijakan *bottom up economics* cenderung cocok untuk diterapkan. *Bottom up economics* dapat memberdayakan masyarakat luas sehingga tercipta inklusi ekonomi dan nilai tambah bagi perekonomian

Trickle down effect



www.economicshelp.org

Collaboration and Co-Creation
in Bottom-up economics



KESIMPULAN

1. Demokratisasi ekonomi masih relevan dan harus terus dilanjutkan dengan berfokus pada pembangunan manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi inovatif selaras dengan perubahan teknologi dan dinamika global
2. Dua kanal utama yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat yaitu Koperasi dan UMKM, harus terus diperhatikan dan didukung dalam ekosistem yang kondusif, termasuk dalam kerangka ekonomi digital
3. Sosialisasi mengenai Ekonomi Pancasila/Kerakyatan ataupun Demokratisasi Ekonomi di Indonesia harus menyentuh pada kesadaran individu, dengan menggunakan media-media yang mudah diakses
4. Keberpihakan harus dilaksanakan, sesuai semangat UUD 1945 dan terukur hasilnya, serta evaluasi kinerja Kementerian dan Lembaga terkait hal ini harus terlaksana dengan tepat.
5. Sudah terbukti bahwa pendekatan trickle down effect tidak berjalan efektif dan ditunjukkan melalui Gini rasio sebesar 0,382 (Maret 2019). Oleh karena itu *Strategi "Bottom Up Economy"* menjadi mendesak untuk diterapkan, *"Empowering The Poor but not Weakening the Rich"*. Hal ini untuk memperkuat kekokohan struktur ekonomi Indonesia, dimana dunia memasuki era persaingan yang semakin ketat dan tingginya tingkat ketidakpastian masa depan.

TERIMA KASIH

